

## **Pelibatan *Private Military Company* dalam Misi Perdamaian di Afghanistan oleh PBB di Tahun 2014**

**Cahyo Tri Prasetyo, Fuat Albayumi, Abubakar Eby Hara**  
Universitas Jember

E-mail: [tiprasetyoc@gmail.com](mailto:tiprasetyoc@gmail.com)

### ***Abstract***

*The level of security in Afghanistan has started to deteriorate since American military activities began. This is because the fight between the United States and the Taliban organization is causing an increasing number of civilian deaths. The United Nations (UN) is now involved in settling the conflict in Afghanistan as a result of the escalating conflict conditions there. In addition to deploying troops from member nation contingents, the UN also enlists the aid of a Private Military Company (PMC) to help carry out the peace mission in Afghanistan. However, International organization role theory and rational choice theory are both used in this Article.*

**Keyword:** UN, PMC, Afganistan

### **1. Pendahuluan**

Afganistan adalah negara Asia di Asia Tengah, dengan medan pegunungan terjal membentang dari timur laut ke barat daya (Division, 2008). Dalam sejarahnya Afghanistan kerap kali menjadi salah satu objek kampanye militer sejak era Alexander Agung hingga era modern ini. Afghanistan menjadi salah satu daerah yang cukup sering timbul konflik di daerahnya. Salah satu konflik terpanjangnya adalah konflik yang timbul pasca terjadinya peristiwa pada tanggal 11 September 2001. Afghanistan yang pada saat itu di kuasai oleh Taliban dituding melindungi kelompok Al Qaeda yang bertanggung jawab atas penyerangan peristiwa pada tanggal 11 September tersebut. Hal ini menjadikan Afghanistan menjadi objek kampanye militer Amerika Serikat dan *International Security Assistance Force* (ISAF) dalam pemberantasan terorisme global yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001.

Sejak dimulainya operasi militer oleh Amerika Serikat, kondisi keamanan di Afghanistan telah mulai menurun. Hal ini dikarenakan semakin tingginya jumlah korban yang terus meningkat dari pihak sipil yang diakibatkan oleh konflik antara Amerika Serikat dan kelompok Taliban. Memanasnya kondisi konflik di Afganistan menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus ikut andil dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. PBB dalam misinya di Afganistan melalui Dewan Keamanan membentuk *United Nation Assistance Mission in Afganistan* (UNAMA)<sup>1</sup> pada tanggal 28 Maret 2002. Di Afghanistan UNAMA memiliki misi yaitu untuk mendukung rakyat dan institusi Afghanistan dalam mencapai perdamaian dan stabilitas, sejalan dengan hak dan kewajiban yang diabadikan dalam konstitusi Afghanistan” (UNAMA,2020).

---

<sup>1</sup> UNAMA adalah special political mission yang didirikan guna membantu Afganistan dan masyarakat afganistan guna membangun fondasi dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan dan perkembangan. Diakses dari <https://unama.unmissions.org/about>. Diakses pada 22 Januari 2022

UNAMA melakukan beberapa usaha guna mencapai misi di Afghanistan antara lain: mendukung pencegahan dan penyelesaian konflik, mempromosikan perdamaian di tingkat lokal dan nasional, mempromosikan inklusi dan kohesi sosial, memperkuat kerja sama untuk mendukung perdamaian dan stabilitas regional, dan pembangunan perdamaian yang tanggap gender. Langkah-langkah keadilan pembangunan perdamaian, termasuk dukungan untuk pemulihan dan pelaksanaan masa transisi. Memperkuat negara Afghanistan dengan mempromosikan kepemilikan dan akuntabilitas nasional di bawah supremasi hukum, membangun pemerintahan yang baik yang menghormati hak asasi manusia, dan memberikan layanan dasar kepada rakyat Afghanistan. Menciptakan ikatan yang kuat antara pemerintahan Afghanistan dengan masyarakat internasional dalam mencapai perdamaian, pemerintahan dan pembangunan. (UNAMA, 2020)

Pada tahun 2014 merupakan tahun yang sangat penting bagi misi perdamaian di Afghanistan karena tentara NATO Internasional menyelesaikan misi tempurnya dan menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada Angkatan Darat Afghanistan. Hal ini memberi momentum kepada Taliban untuk menduduki lebih banyak wilayah. Pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Taliban dimulai dengan lambat, tetapi pemerintah Afghanistan tidak terlibat. Perjanjian Amerika Serikat-Taliban tidak menghentikan serangan Taliban, sehingga Taliban mengalihkan fokus mereka ke pasukan keamanan Afghanistan dan warga sipil, menargetkan pembunuhan. (*Public Broadcasting Service, 2021*)

Pada tahun 2014, kekerasan terkait konflik juga semakin meningkat dan mempengaruhi warga sipil di Afghanistan, dengan peningkatan jumlah korban sipil dari jumlah yang sudah meningkat pada tahun 2013. Serangan oleh elemen anti-Pemerintah (Taliban dan kelompok oposisi bersenjata lainnya) terhadap Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan meningkat seiring pemberontak berusaha untuk mengeksploitasi ketidakpastian seputar pemilihan presiden dan menegaskan kontrol sebagai transisi tanggung jawab keamanan dari pasukan militer internasional ke pasukan Afghanistan berakhir. Meningkatnya tekanan dari elemen anti-Pemerintah dan tingginya jumlah korban yang dialami oleh Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan menyebabkan pasukan Afghanistan berkonsentrasi pada perlindungan kekuatan dan pemulihan wilayah yang disengketakan, yang membatasi peran utama mereka dalam melindungi warga sipil dari kekerasan terkait konflik. (BBC, 2021)

Selain itu, dari bulan Januari hingga bulan November 2014, kematian dan cedera warga sipil akibat kekerasan terkait konflik meningkat. Dengan demikian, tahun 2014 menjadi tahun dengan jumlah kematian dan cedera warga sipil tertinggi yang dicatat oleh UNAMA/OHCHR sejak tahun 2009. Antara tanggal 1 Januari dan tanggal 30 November 2014, UNAMA/OHCHR mendokumentasikan 9.617 korban sipil (3.188 warga sipil tewas dan 6.429 terluka). UNAMA mengaitkan 75 persen korban sipil dengan unsur-unsur anti-Pemerintah, 11 persen dengan pasukan pro-Pemerintah, yang terdiri dari Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan dan pasukan militer internasional, dan 9 persen karena pertempuran darat antara pasukan pro-Pemerintah dan anti-Pemerintah. Sementara tiga perempat dari semua kematian dan cedera warga sipil disebabkan oleh elemen anti-Pemerintah, peningkatan korban sipil yang disebabkan oleh pasukan Pemerintah Afghanistan juga sering terjadi. Untuk pertama kalinya, pertempuran darat menjadi penyebab utama korban sipil, dengan semakin banyak warga sipil yang terbunuh atau terluka dalam baku tembak tersebut. Peningkatan korban sipil ini secara tidak proporsional mempengaruhi anak-anak

yaitu korban anak-anak 33 persen lebih tinggi daripada yang tercatat pada November 2014, setidaknya 44 anak tewas atau terluka setiap minggu di Afghanistan.(U.S Department of State, 2021)

Menanggapi hal tersebut, PBB selain menggunakan prajurit dari kontingen negara anggota, PBB juga menggunakan jasa dari *Private Military Company* (PMC) guna membantu berjalannya misi perdamaian di Afghanistan. Sebagai contohnya penggunaan *Global Strategist Group*<sup>2</sup> pada tahun 2002 dan tahun 2004 untuk membantu berjalannya pemilu dengan cara menyediakan jaringan komunikasi, pengoperasian jaringan komunikasi dan penyediaan logistik pemilu, serta menjalin kontrak dengan IDG Security<sup>3</sup> sebagai penyedia jasa keamanan kepada PBB untuk misi di Afghanistan mulai tahun 2004.

*Private Military Company* (PMC) memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum mulai banyak diminati seperti sekarang. Pasca berakhirnya perang dingin terjadi banyak perubahan pada peran aktor-aktor dalam dunia hubungan internasional, salah satu contohnya adalah Amerika Serikat yang menjadi kekuatan tunggal pasca runtuhnya Uni Soviet. Selain Amerika Serikat yang menjadi kekuatan tunggal berakhirnya perang dingin, ini juga menyebabkan pemotongan anggaran militer dari negara-negara yang terlibat dalam perang dingin. Dengan pemotongan anggaran militer ini menyebabkan pengurangan personil militer. Dampak dari pengurangan personil militer ini menyebabkan banyaknya personel militer yang terlatih dan beberapa dari pasukan khusus kehilangan pekerjaan mereka. Selain hilangnya lapangan pekerjaan dari militer terlatih, pergeseran konflik yang terjadi pasca perang dingin dari konflik antar negara menjadi konflik berbentuk revolusi dalam negeri serta konflik antar etnis menimbulkan masalah baru dalam internal negara. Hal ini dikarenakan kurangnya sokongan dana dari negara penyokong sebelumnya, seperti contohnya blok barat dan blok timur ketika perang dingin masih berjalan, dimana Amerika Serikat sebagai pemimpin blok barat sering kali memberikan bantuannya di negara yang disokong begitupun sebaliknya di sisi blok timur Uni Soviet juga memberikan bantuan ke negara yang disokongnya contohnya pada perang Korea dimana Amerika Serikat memberikan bantuan untuk Korea Selatan dan Uni Soviet memberikan bantuan untuk Korea Utara.

Sedangkan menurut penjelasan situs *britannica* yang dimaksud dengan *Private Military Company* adalah “Perusahaan swasta yang menawarkan layanan militer kepada *Government, International Organization dan Substate actor*” (Bell, *Private Military Company*, 2016). Karena berbentuk korporasi, PMC dapat menjalin kontrak dengan siapapun yang menggunakan jasanya yaitu mulai dari *Government, International Organization dan Substate Actor*, selain dalam bidang keamanan yang menggunakan personil bersenjata PMC juga memberikan layanan berupa *Military Advice, Logistical Support*. *Military Advice* yaitu berupa pelatihan militer terhadap negara pengontrak dan pengajaran taktik tempur, sedangkan *Logistical Support* berbentuk pemberian perlindungan terhadap aset-aset dari pengontrak dan

---

<sup>2</sup> Global Strategis Group adalah perusahaan penyedia konsultasi jasa strategi dan keamanan yang didirikan pada tahun 1998 yang project pertama mereka adalah penanganan pasca konflik di Kosovo. Diakses dari :<https://globalgroup.com/> . Diakses pada 16 Februari 2022.

<sup>3</sup> IDG security adalah perusahaan penyedia jasa keamanan dan perlindungan untuk pribadi dan swasta yang didirikan pada 2001 oleh Iaan Douglas Gordon mantan perwira Angkatan Darat Inggris. IDG Security memiliki anggota yang mayoritas adalah mantan anggota pasukan Gurka. Diakses dari: <https://idg-security.com/about-us/>. Diakses pada 16 Februari 2022.

memberikan pinjaman bantuan peralatan seperti helikopter untuk bantuan logistik dan pengoperasian *drone* guna membantu pengawasan aset-aset pengontrak baik berupa *humanitarian aset* ataupun *non humanitarian aset*. Dalam menjalankan kontraknya selain menjalankannya dengan sukses dan berjalan dengan lancar PMC juga melakukan beberapa tindakan pelanggaran terhadap HAM, pada tahun 2004 muncul laporan kekerasan terhadap tahanan di fasilitas penjara Abu Ghraib menurut laporan dari *Center for Constitutional Right (CCR)*<sup>4</sup> terjadi tindakan penyiksaan terhadap tahanan, kekerasan itu berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta penyiksaan mental, PMC yang terlibat dalam kasus ini adalah *California Analysis Center Inc (CACI) International* dan *L-3 Service* yang pada dasarnya CACI di kontrak untuk menjadi penerjemah personel US Army saat melakukan interogasi di Abu Ghraib. (Right, 2015) Sedangkan pada tanggal 11 September 2007 personel dari *Black Water Consulting* yang pada saat itu melakukan kontrak dengan Amerika Serikat yang ditugaskan untuk melakukan pengawalan terhadap pejabat Amerika Serikat di Iraq melakukan penembakan kepada masyarakat sipil di Nisour Square pada siang hari, menurut laporan dikatakan bahwa personel Black Water datang ke lokasi karena adanya kasus bom mobil, dan menurut personel Black Water mereka melakukan tembakan karena adanya ancaman mengarah pada mereka, sedangkan menurut para saksi ditempat kejadian ketika personel *Black Water* menembak pengendara di sebuah mobil dan dilanjutkan dengan melakukan penembakan secara acak, kasus ini dikenal dengan *Nisour Square Massacer* yang menewaskan 17 orang dan melukai 20 orang lainnya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis meneliti: **Mengapa PBB melibatkan *Private Military Company* dalam misi perdamaian di Afganistan tahun 2014?**

### **Teori Peran Organisasi Internasional**

Organisasi internasional (OI) memiliki dua tipikal peranan yang pertama adalah organisasi yang memiliki peran dalam cangkupan tertentu sedangkan tipikal yang lain adalah organisasi yang memiliki cangkupan peran yang sangat luas. Secara alamiah peran dari suatu organisasi internasional akan berpengaruh terhadap fungsinya dalam suatu hubungan internasional. Dalam bukunya Clive Archer membagi peran organisasi internasional menjadi tiga yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor. (2001, p. 68)

Organisasi internasional sebagai instrumen adalah organisasi internasional ditempatkan sebagai alat dari negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu, hal ini dikarenakan negara-negara anggota dari sebuah organisasi internasional juga memiliki tujuan tertentu saat mulai bergabung dengan organisasi tersebut. Mengutip dari yang disampaikan oleh Gunnar Myrdal:

*“In the typical case international organizations are nothing else than instruments for the policies of individual governments, means for the diplomacy of a number of disparate and sovereign national states. When an intergovernmental organization is set up, this implies nothing more than that between the states a limited agreement has*

---

<sup>4</sup> Center for Constitutional Right adalah lembaga advokasi hukum yang berdiri mulai tahun 1966, CCR bergerak melalui litigasi, advokasi, dan komunikasi strategis dalam kasus rasisme struktural, kekerasan gender, ketidakadilan ekonomi dan kesewenang-wenangan pemerintah. Diakses dari <https://ccrjustice.org/home/who-we-are/mission-and-vision>. Diakses pada 25 Januari 2022

*been reached upon an institutional form for multilateral conduct of state activity in a certain field”*.(2001)

Dapat dipahami dari bahasan di atas bahwa peran OI sebagai instrumen sering digunakan oleh negara-negara anggotanya sebagai alat untuk menjalankan kebijakan politik luar negerinya dan sebagai sarana diplomasi antar negara anggotanya guna mencapai tujuan tertentu masing-masing negara anggotanya.

Kemudian peran OI sebagai arena, yang dimaksud dengan arena adalah OI menyediakan tempat bagi setiap anggotanya untuk saling menyampaikan pendapat, berdiskusi, bekerja sama serta saling menyampaikan ketidaksetujuan antar anggotanya. Dalam bukunya Clive Archer mengatakan :*“Arenas in themselves are neutral; they can be used for a play, a circus or a fight”*(2001, p. 73). Karena kondisi arena yang dikatakan netral hal ini membuat setiap anggotanya dapat lebih bebas mengeluarkan setiap kepentingan dari masing-masing negara karena dalam arena yang bersifat netral minim penguasaan dari salah satu pihak yang dominan. Stanley Hoffman memberikan contoh bagaimana suatu OI dalam hal ini adalah PBB yang menjadi arena bagi anggotanya: *“As an arena and a stake it has been useful to each of the competing groups eager to get not only a forum for their views but also diplomatic reinforcement for their policies.”*(2001, p. 74)

Salah satu peran OI yang terakhir dari yang di sampaikan oleh Clive Archer yaitu peran organisasi internasional sebagai aktor, dalam perannya sebagai aktor OI bersifat independen dimana OI dapat bertindak secara independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan dari luar termasuk negara. Dengan memiliki independensi ini OI akan memiliki power untuk mempengaruhi berjalannya peristiwa-peristiwa di dunia. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Arnold Wolfers:

*“Ketika ini terjadi, entitas-entitas ini menjadi aktor di panggung internasional dan pesaing negara-bangsa. Kemampuan mereka untuk bertindak sebagai aktor internasional atau transnasional dapat dikaitkan dengan kepentingan laki-laki dalam mengidentifikasi diri mereka sendiri dan dengan kelompok-kelompok non-negara-bangsa.”*(1962, p. 23).

Peran sebagai aktor independen dari suatu OI dapat kita lihat dari PBB dalam usahanya dalam *peacekeeping mission*. Clive Archer memberikan tiga kriteria untuk menguji independensi dari PBB tersebut, yaitu *existence of control*, *independent decision* dan yang terakhir *without peacekeeping facilities*. Pada *existence of control* yang menjadi tolak ukur independensi PBB dalam upaya *peacekeeping*, kontrol ini biasanya dilakukan melalui majelis umum atau melalui dewan keamanan bahkan bisa melalui anggota. Kemudian pada poin *independent decision*, keindependenan dari PBB dapat dikuatkan dengan pendapat yang disampaikan oleh Andrew Wellington Cordier dan Wilder Foote : *“The right of initiative given to the Secretary-General in the Charter for situations of emergency is important especially because this right implies a recognition of his responsibility for action for peace...irrespective of the views and wishes of the various Member Governments.”*(1972, p. 285) Pada poin *without peacekeeping facilities* ke independen PBB diuji dalam tindakan yang diambil bila pada suatu ketika pada *peacekeeping mission* oleh karena satu atau dua hal PBB tidak dapat menggunakan fasilitasnya yang termasuk di dalamnya adalah personel dan peralatan, dalam hal ini PBB akan mencari agen yang dapat menggantikan aktivitasnya dalam *peacekeeping mission*. Dalam bukunya Clive Archer memberikan contoh: *“This was done when Western observers and military*

*took over the role of UNEF II in Sinai in order to observe the implementation of the last stage of the camp David Israel–Egypt agreement in 1982(Archer, 2001)”*

### **Teori Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional dalam urusan internasional dikembangkan pada awal tahun 1960-an. Teori ini didefinisikan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan atau keputusan dari aktor yang berorientasi pada tujuan. Aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan teori pilihan rasional mencoba menjelaskan pilihan terbaik bagi pengambil keputusan. Teori ini digunakan untuk menjawab apakah keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan dapat dianggap berhasil dalam mencapai kepentingan *stakeholders* di lingkungan internasional. (Bartnett & Finnemore, 2013) Stephen M. Waltz mengatakan:

“(1) Teori pilihan rasional bersifat individualistis. Konsekuensi sosial dan politik dilihat sebagai produk kolektif dari keputusan individu (atau sebagai produk keputusan yang dibuat oleh aktor individu). 2) Teori pilihan rasional mengandaikan bahwa setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan kemampuannya. "Utilitas yang diharapkan secara subjektif" -nya. Dengan serangkaian pengaturan tertentu dan serangkaian pilihan yang mungkin, aktor memilih hasil yang memberikan manfaat maksimal yang diharapkan. (3) Ada batasan tertentu dalam menentukan preferensi aktor. (A) Preferensi aktor harus lengkap (yaitu, preferensi aktor dapat diurutkan untuk hasil yang berbeda) (B) Setting harus transitif (A didahulukan dari C jika A didahulukan dari B dan B didahulukan dari C).”(Wolfers, 1962)

Dalam penjelasan di atas, ada tiga hal yang dijelaskan Waltz dalam kaitannya dengan teori pilihan rasional. Pertama, teori pilihan rasional bersifat pribadi. Artinya, konsekuensi sosial dan politik dianggap sebagai produk kolektif dari keputusan individu (atau produk dari keputusan aktor individu). Selain itu, Waltz menambahkan aktor kesatuan (organisasi internasional) ke dalam aktor teori pilihan rasional. Kedua, Waltz berasumsi bahwa aktor berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya dengan membuat pilihan yang memberikan hasil terbesar untuk kepentingannya. Ketiga, teori pilihan rasional berfokus pada preferensi aktor untuk kendala tertentu. Misalnya, seorang aktor memiliki beberapa pilihan. Pada dasarnya, Waltz mengatakan bahwa teori pilihan rasional adalah alat untuk menarik kesimpulan logis tentang bagaimana orang (atau negara) membuat keputusan. Dari penjelasan teori pilihan rasional di atas, dapat kita simpulkan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk mengarahkan keputusan organisasi, atau tujuan dan sasaran untuk mencapai kepentingan organisasi dalam lingkungan internasional. Konsep ini mengandaikan rasionalitas. Artinya, pilihan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan benar dan salah, tetapi pada perhitungan atau perhitungan untung rugi (*cost-benefit* perhitungan). Ada beberapa hal yang saling terkait ketika menerapkan kebijakan berdasarkan konsep pilihan rasional. Menurut Allison, model pengambilan keputusan rasional terdiri dari aktor tunggal yang memainkan peran aktor rasional dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara. Dalam pengambilan keputusan, tentu ada beberapa faktor, baik eksternal maupun internal, yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berlangsung di tingkat individu dan kelompok. Berbagai tindakan negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua opsi dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan manfaatnya. (Smith S., 1980)

Dalam hal ini, teori pilihan rasional menjelaskan mengapa aktor politik secara konsisten memilih cara yang paling efisien untuk mencapai tujuannya. Artinya, mencoba menjelaskan mengapa orang membuat pilihan tertentu yang mereka anggap masuk akal bagi pengambil keputusan. Dalam teori pilihan rasional, seorang individu dianggap sebagai keinginan atau tujuan yang mengekspresikan seleranya. Mereka bertindak dengan sengaja berdasarkan informasi yang mereka miliki tentang keadaan di mana mereka berdagang. Sederhananya, hubungan antara preferensi dan batasan data adalah murni untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan alat. Mereka juga harus membuat keputusan tentang tujuan mereka dan cara untuk mencapainya, karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua yang mereka inginkan. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu perlu memprediksi hasil dari program alternatif dan menghitung apa yang terbaik. (Scheling, 2014)

## 2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis mengakses data tersebut melalui: *E-Book* dan Buku, Jurnal, Laporan resmi dan *statement* resmi dari PBB yang di akses melalui *website* resmi PBB dan situs berita.

## 3. Hasil Penelitian dan Diskusi

Dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional dan teori pilihan rasional, PBB sebagai organisasi internasional yang mendapatkan mandat dari negara-negara anggotanya dan memiliki peran untuk menjaga keamanan serta perdamaian di Afghanistan menemukan kendala dimana misi UNAMA ini oleh pejabat dewan kewananan dianggap memiliki tingkat keberhasilan yang cukup kecil dan membahayakan bagi personil dari *UN Blue Helmet* sehingga melibatkan PMC dalam misinya pelibatan PMC adalah alternatif yang dapat diambil mengingat banyaknya keuntungan penggunaan PMC salah satunya adalah kualitas personil-personilnya.

### Efisiensi Biaya

Keuntungan dari PMCs adalah efisiensi biaya dan efektivitas PSC yang unggul di beberapa area operasi. Khususnya PSC lokal bisa jauh lebih murah karena mereka membayar upah dunia ketiga. Mereka juga bisa lebih efektif karena mereka dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, jaringan, budaya dan keterampilan bahasa. *Swisspeace* melaporkan dari survei kelompok fokus di Afghanistan bahwa beberapa organisasi mencatat bahwa anggota staf mereka sendiri (seringkali karyawan lokal) memiliki akses ke informasi yang lebih relevan dan berkualitas lebih baik daripada yang dapat ditawarkan oleh perusahaan keamanan perusahaan, dan bahwa banyak PSP internasional melakukannya tidak memberikan nilai uang. Tidak hanya kebangsaan kontraktor yang penting, jenis layanan juga berperan dalam menentukan apakah PSC lebih hemat biaya daripada menggunakan personel berseragam. Tugas-tugas sipil yang bersangkutan, seperti katering, pengelolaan limbah, dukungan TI, logistik dan transportasi, perusahaan swasta bersaing di pasar bebas dan dapat menghasilkan skala ekonomi yang membantu mereka untuk memasok fungsi-fungsi

ini dengan harga lebih rendah daripada tentara. Penilaian apakah kontraktor swasta memang lebih hemat biaya sangat berbeda. (Detsch, 2021)

Kementerian Pertahanan Jerman telah melaporkan bahwa penjagaan pribadi instalasi militer di Jerman sekitar 49 persen lebih murah daripada penggunaan personel militer. Sebaliknya, Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat telah mencatat bahwa Departemen Pertahanan sering memberikan kontrak penjagaan keamanan tanpa persaingan, membayar sekitar 25 persen lebih banyak daripada kontrak lain. Faktor utama yang mempengaruhi biaya tampaknya adalah apakah kontraktor beroperasi di lingkungan yang tidak bersahabat, yang menaikkan harga, dan apakah klien memberikan kontrak berdasarkan kompetisi terbuka daripada daftar penawar pilihan. Faktor lain yang meningkatkan biaya adalah risiko keamanan yang dibesar-besarkan oleh beberapa PSC. Pada contoh kasus di Afghanistan, pengamat menyarankan bahwa beberapa perusahaan mempertahankan penilaian berisiko tinggi di tempat lebih lama daripada yang diperlukan untuk membenarkan penggunaan lanjutan mereka. Akhirnya, penggunaan PSC dalam operasi militer dan stabilitas multilateral menimbulkan pertanyaan apakah dana yang dikeluarkan untuk mereka hemat biaya dalam konteks yang lebih luas. (Prado, 2012, pp. 15-18)

### **Penyediaan Layanan Logistik dan Keamanan Pangkalan**

Kontraktor swasta pada awalnya digunakan untuk menyediakan logistik dan layanan dukungan dasar. Namun, berbeda dengan konflik sebelumnya, peran mereka di tahun-tahun berikutnya secara tradisional adalah militer, termasuk pelatihan dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata, terutama *Afghan National Army* (ANA), dan layanan dukungan operasional termasuk pemeliharaan dan operasi. Hal ini telah diperluas lebih lanjut ke kawasan lindung. Senjata, peralatan tempur, ranjau dan penghancuran ladang opium. Tapi mungkin contoh terbaik dari privatisasi dinas militer di Afghanistan adalah perluasan peran kontraktor swasta di sektor intelijen. Memang, kontraktor swasta pertama telah disewa untuk masuk ke Afghanistan hampir setelah peristiwa 9/11 sebagai bagian dari misi kontra-terorisme pertama yang dikomandoi CIA untuk melakukan operasi ofensif terhadap Taliban dan Al-Qaeda. Kegiatan kontraktor swasta di daerah ini juga termasuk pengintaian, melakukan interogasi dan pengumpulan informasi serta analisis data termasuk 'gatekeeping'. (Zadzorova, 2015, pp. 3-10)

UNAMA menyatakan bahwa fungsi utama UNAMA di Afghanistan adalah membangun budaya damai, antara lain: mendukung pencegahan dan penyelesaian konflik, serta proses perdamaian, mempromosikan inklusi dan kohesi sosial, memperkuat kerja sama regional dalam mendukung perdamaian dan stabilitas, mendukung proses pembangunan perdamaian dan pemulihan yang peka gender, dan penerapan keadilan transisional, memperkuat negara Afghanistan dengan mempromosikan kepemilikan nasional dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab yang dibangun di atas supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang menyediakan layanan dasar bagi penduduk di seluruh negeri, dan mencapai koherensi yang lebih besar antara prioritas pemerintah Afghanistan dan upaya masyarakat sipil internasional di bidang perdamaian, pemerintahan, dan pembangunan. PBB tidak memasukkan pasukan penjaga perdamaian atau UN Blue Helmets dalam UNAMA.(UNAMA, 2021)

Seperti dilaporkan oleh CS Monitor, pada tahun 2001 Mohammad Qassim, Menteri Pertahanan Pemerintah Sementara Afghanistan, menyerukan pengerahan

5.000 hingga 6.000 penjaga perdamaian untuk mengamankan Kabul selama perang (Yordania 2018). Menurut salah satu pemimpin *United Nations Blue Helmet*, perang di Afghanistan memiliki tingkat bahaya yang tinggi, bukan hanya konflik kemanusiaan dan perang saudara. Menurutnya, jaminan helm biru PBB akan berhasil di Afghanistan sangat kecil dan risikonya terlalu tinggi (Jordan2018). David Phillips, wakil direktur *Council on Foreign Relations Center for Preventive Actions*, juga mengatakan bahwa PBB tidak ingin bertanggung jawab atas misi berisiko tinggi di Afghanistan, tetapi jaminan keberhasilannya rendah (Yordania 2018). Sebaliknya, pada tahun 2001 Dewan Keamanan PBB menyetujui koalisi yang dipimpin Inggris, termasuk delegasi pertama Uni Eropa dan pasukan dari beberapa negara Islam, dengan imbalan helm operasi penjaga perdamaian PBB. (Yordania, 2018).

Selain itu, harus dicatat bahwa strategi kontra-terorisme yang diartikulasikan di sekitar CIA dan Pasukan Khusus Amerika Serikat tidak hanya mencakup ketergantungan pada kontraktor swasta tetapi juga mempekerjakan milisi lokal yang berafiliasi dengan orang kuat Afghanistan. Menurut beberapa ahli, mitra lokal ini memberikan intelijen yang dapat digunakan dalam perburuan mereka untuk 'teroris', cadangan tenaga tambahan, dan kadang-kadang kekuatan proksi untuk melakukan kegiatan rahasia seperti serangan lintas batas ke Pakistan. Faktanya, privatisasi keamanan dengan rekonstruksi negara berfokus terutama pada penyediaan keamanan untuk personel dan fasilitas perusahaan asing, memastikan keamanan VIP, dan memberikan saran tentang penilaian risiko. Akibatnya, sistem yang menggabungkan keamanan publik dan swasta nasional telah dibentuk. Melalui sistem ini, keamanan pemangku kepentingan internasional dan properti didelegasikan kepada PMSC, tetapi perlindungan tempat-tempat umum, properti dan warga sipil terutama menjadi tanggung jawab polisi dan pasukan keamanan. Afghanistan (ANP dan ANSF) belum siap dan pelatihannya diserahkan kepada PMSC yang sama. Berbagai layanan yang mengintegrasikan masing-masing kategori keamanan ini secara mendasar telah mendorong pertumbuhan industri militer sipil negara itu dan telah meluncurkan dimensi baru dalam cakupannya. Sementara itu, perusahaan militer swasta dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan baru dan mulai menyediakan dan melaksanakan layanan militer dan keamanan pada saat yang bersamaan. Selain itu, berbagai layanan keamanan telah menyebabkan berbagai klien baru mengadopsi PMSC. Klien publik seperti Tentara Internasional, misi diplomatik, organisasi rekonstruksi, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta jurnalis, mitra yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekonstruksi, LSM, perusahaan komersial, orang asing, organisasi swasta seperti Afghanistan, dan layanan pribadi. (Warsaw Institute, 2020)

### **Kebijakan yang Fleksibel dan Kontinuitas**

Fleksibel dalam hal ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ketika lingkungan berubah, itu memunculkan peluang, ketidakpastian dan risiko. Karenanya, perusahaan yang fleksibel berusaha untuk mengatasinya dengan mengadaptasi strategi mereka. Tujuannya adalah untuk membuat daya saing strategis mereka relevan dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. (Bell, 2016)

Dalam hal ini, PMC dapat dengan cepat merekrut talenta potensial di Amerika Serikat dan negara-negara Dunia Ketiga untuk ditempatkan di Afghanistan. Kombinasi kecepatan dan profil politik yang rendah menjadikan PMC pilihan yang

menarik untuk menyediakan sumber daya yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah (Benicsak, 2009: 8). Selain itu, adanya kontinuitas adalah keuntungan terbesar kedua. Militer Amerika Serikat mengganti personel militer setiap 6 hingga 12 bulan, tetapi personel militer sipil siap untuk tinggal lebih lama. Perusahaan biasanya menawarkan bonus besar kepada karyawan yang bersedia memegang kontrak lebih lama. Perusahaan militer swasta mendapatkan keuntungan yang sesuai (Hammes, 2010:2). PMC memiliki senjata berat dan beroperasi dalam situasi konflik, PMC telah berfungsi tanpa adanya kerangka peraturan nasional untuk memeriksa perekrutan karyawan mereka, untuk mengontrol senjata mereka dan untuk memantau aktivitas mereka. Ada juga ketidakjelasan dalam perilaku mereka dan kurangnya transparansi yang telah dikelola oleh perusahaan melalui penciptaan banyak lapisan anak perusahaan atau subkontrak di berbagai negara.(United Nations, 2019)

Pada 2011, Guardian melaporkan bahwa *Aegis Defense Service* merekrut tentara dari negara-negara Afrika seperti Sierra Leone dan Rwanda (Loss 2016). Faktanya, keterlibatan PMSC dalam penggunaan senjata jarang terlihat dalam laporan resmi PBB. Dalam misi UNAMA sendiri, Pejabat Urusan Politik PBB yang terbang ke Faizabad untuk mengkonfirmasi situasi dilaporkan terkejut melihat para pekerja dalam Strategi Risiko Global bersenjata (Pingeot, 2011). Pada saat itu, strategi risiko global tidak dialihdayakan dari perspektif keamanan, tetapi staf mereka bersedia menggunakan serangan bersenjata saat sangat dibutuhkan. Karena kurangnya transparansi mengenai penggunaan PMSC oleh PBB, biasanya ada kesalahpahaman tentang layanan di mana PMSC digunakan, ruang lingkupnya, dan hubungan antara PBB dan PMSC dalam misi. PMSC banyak digunakan oleh PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian, kemanusiaan dan politik seperti UNAMA.(Cimini, 2018, pp. 4-16)

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengarahkan banyak misi politik di Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah. Misi-misi ini, yang ditugasi dengan diplomasi dan pembangunan perdamaian untuk mencegah atau menyelesaikan konflik, dilaksanakan melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi pembangunan dan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa dari misi tersebut saat ini berada dalam lingkungan yang tidak bersahabat, salah satunya adalah Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA). Tidak seperti wilayah lain di mana pasukan penjaga perdamaian dikerahkan, Afghanistan umumnya merupakan wilayah dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Hal ini dikarenakan sifat konflik di Afghanistan yang sudah mencapai tahap konflik bersenjata terbuka bahkan perang terbuka. Oleh karena itu, sebagai organisasi antar pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya berfokus pada pemeliharaan keadaan kawasan yang aman dan damai, bukan pada penciptaan perdamaian itu sendiri (*peacekeeping is not peacebuilding*). Masalahnya adalah bahwa konflik di Afghanistan sebenarnya melibatkan berbagai perang tidak teratur, dan pemangku kepentingan sering mengadopsi strategi seperti bom bunuh diri dan serangan mendadak di lapangan. Oleh karena itu, PBB juga melihat bahwa pada titik tertentu pasukan perdamaian tidak bisa mencapai tujuan mereka di Afghanistan (Østensen, 2013, pp. 19-36). Dengan kata lain, penempatan PMSC PBB di Afghanistan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan keamanan, termasuk penilaian dan perencanaan risiko, tetapi juga pada perlindungan fisik. Mengingat terbatasnya jumlah personel dan senjata di lapangan, PBB mengakui perlunya unit yang mampu melakukan tugas tertentu yang dapat ditambahkan atau ditukar, dan PBB menyediakan PMSC untuk menyediakan layanannya. (Wulf, 2005, pp. 36-37. ).

## Mengurangi Korban Militer Reguler

Personil PMC telah terbukti mengurangi korban militer. Pada akhir tahun 2009, sekitar 1.800 personel PMC dilaporkan tewas dan 40.000 terluka di Irak dan Afghanistan. Ketika pertempuran di Afghanistan meningkat, personel PMC membunuh lebih banyak daripada militer Amerika Serikat. "Dalam dua kuartal pertama tahun 2010 saja, kematian personel PMC menyumbang lebih dari setengah (53%) dari semua kematian. Sejak bulan Januari 2010, jumlah personel PMC yang tewas di Irak dan Afghanistan telah Lebih dari jumlah personel militer Amerika Serikat yang tewas (Schooner and Swan, 2010, pp. 17). Secara administratif, karyawan PMC yang menjadi korban perang tidak dilaporkan melalui Departemen Pertahanan, hanya melalui Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dalam website Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat ini berisi statistik cedera dan kematian untuk memproses klaim asuransi. Namun, seringkali tidak cukup komprehensif sehingga sulit untuk menentukan jumlah personel PMC yang dikorbankan di Afghanistan atau di tempat lain. Akibatnya, mobilisasi militer swasta memungkinkan Amerika Serikat terlibat dalam konflik tanpa meyakinkan pihak Rakyat Amerika akan kebutuhan untuk menambah jumlah pasukan yang aktif Keputusan untuk mengadopsi PMC dapat dibuat dari sudut pandang masyarakat umum, tetapi keputusan untuk menaikkan tingkat angkatan bersenjata biasanya dilakukan melalui perdebatan sengit. Penentang PMC menunjukkan bahwa kehadiran PMC dapat mengurangi korban tentara reguler, sehingga memudahkan politisi Amerika Serikat untuk memulai konflik berkepanjangan (Isenberg, 2009: 5).

Karyawan PMC memang adalah individu yang sangat terampil yang diyakini sebagai mantan anggota "pasukan elit dari tentara terlatih terbaik di dunia." Pada sisi lain, misi yang disahkan oleh PBB biasanya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang pasukan mereka. PBB telah mengakui bahwa mereka menghadapi kesulitan untuk memperoleh misinya orang-orang yang relatif terampil untuk memenuhi tugas-tugas militer yang diperlukan. Oleh karena itu, ketika seorang PMC terdiri dari personel militer yang berpengalaman seperti itu, keunggulannya terhadap pasukan PBB, yang juga termasuk pasukan yang jauh dari siap untuk menghadapi situasi yang mereka hadapi, tidak dapat dipertanyakan.

## 4. Kesimpulan

PBB melibatkan *Private Military Company* dalam misi perdamaian di Afganistan tahun 2014 adalah karena keuntungan yang ditawarkan oleh *Private Military Company*. Keuntungan yang didapatkan oleh PBB dalam penggunaan *Private Military Companies* dalam menangani konflik di Afghanistan yang pertama yaitu berupa efisiensi biaya militer yang digunakan dalam konflik sebagai contoh *contractor Blackwater* yang pada dasarnya adalah mantan prajurit terlatih atau berasal dari satuan pasukan khusus mendapat gaji paling tinggi berkisar 22,500 *US dollar* sedangkan personil dari *US Army* yang berpangkat *private firstclass* yang baru dipromosikan menerima gaji sebesar 22,600 *US dollar*, yang kedua yaitu berupa keuntungan dalam bidang penyedia layanan keamanan dan logistic sebagai contohnya adalah pasukan Gurka dari IDG menembak dan membunuh empat penyerbu di markas besar PBB di Herat pada Oktober 2010, yang ketiga *Private Military and Security Companies* memiliki kebijakan yang fleksibel dimana PMC dapat melakukan rekrutmen secara cepat dibanding dengan militer reguler oleh karena kecepatan rekrutmen ini dapat menutup kekurangan dari militer reguler yang

normalnya melakukan pergantian personil dalam kurung waktu antara 6 bulan hingga 12 bulan dan yang terakhir adalah PMC mampu mengurangi korban militer akibat konflik sebagai buktinya adalah pada tahun 2010 53% korban tewas dari pihak Amerika Serikat adalah dari personil PMC dan sisanya adalah personil dari militer Amerika Serikat.

Individu, negara, organisasi internasional serta perusahaan milik swasta berusaha untuk mencapai hasil terbaik tanpa membuang waktu atau uang mereka. Realitas ini juga telah diperluas ke bidang penyediaan keamanan di mana biaya dan hasil yang diharapkan dipertimbangkan tidak seperti sebelumnya.

## Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). International Organisation. In G. Myrdal, *Instrument* (p. 69). London: Routledge.
- Archer, C. (2001). International Organisation Third Edition. In S. Hoffman, *International Organisation Third Edition* (p. 74). London: Routledge.
- Archer, C. (2001). *International Organisation Third Edition*. London: Routledge.
- Archer, C. (2001). *International Organization Third Edition*. London: Routledge.
- Ardhiansyah, A. (2018). STATUS HUKUM ANGGOTA PRIVATE MILITARY COMPANY BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum*, 3-15.
- Asad, A. L. (2012). Private Security Contractors in Afghanistan as Third-Party Propagators: Categorizing the Participation of Private Security Companies. *Security Journal*, 8-19.
- Bartnett, M. N., & Finnemore, M. (2013). The Politic, Power and Pathologies of International Organization. In R. Jackson, & G. Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan Edisi Kelima* (p. 384). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BBC. (2018, December 2). *What are Private Security Companies Doing in Afghanistan?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-46400647>
- BBC. (2021, August 30). *Taliban Are Back: What Next For Afghanistan?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-49192495>
- Bell, D. (2016, November 2). *Private Military Company*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/topic/private-military-firm>
- Bell, D. (2020). *Private Military Company*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/topic/yeoman-warder>
- Cimini, T. (2018). The Invisible Army: Explaining Private Military and Security Companies. *Journal of International Relations*, 4-16.
- Cordier, A. W., & Foote, W. (1972). *Public papers of the Secretaries-General of the United Nations. Vol. 2, Dag Hammarskjöld, 1953-1956*. London: Columbia University Press.
- Detsch. (2021, August 16). *Departure of Private Contractors was a Turning Point in Afghan Military's Collapse*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2021/08/16/afghanistan-military-collapse-private-contractors/>
- Division, F. R. (2008). *Country Profile : Afganistan*. Library of Congress.
- Hakim, A. B. (2019, October 9). *NATO in Afghanistan: Private Military Contractors are 'Out of the Question'*. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/en/nato-in-afghanistan-private-military-contractors-are-out-of-the-question/a-45811796>

- ICRC. (2019). *Private Military and Security Company*. Retrieved from ICRC: <https://casebook.icrc.org/glossary/private-military-and-security-companies-pmscs>
- Lovelace, D. C. (2010). *Transnational Insurgencies and the Escalation of Regional Conflict: Lessons for Iraq and Afghanistan*. United States: Strategic Studies Institute.
- Powles, A. (2021, August 25). *The Plight of Afghan Security Contractors Highlights the Legal and Moral Risks of Outsourcing War*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/the-plight-of-afghan-security-contractors-highlights-the-legal-and-moral-risks-of-outsourcing-war-166730>
- Prado, J. L. (2012). The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare – Impacts on Human Rights. *The Brown Journal of World Affairs*, 15-18.
- Public Broadcasting Service. (2021, August 30). *A Historical Timeline of Afghanistan*. Retrieved from PBS: <https://www.pbs.org/newshour/politics/asia-jan-june11-timeline-afghanistan>
- Right, C. f. (2015). *Accountability for Abu Gharib Tortuer by Private Military Contractor*. New York: Center for Constitutional Right.
- Scheling. (2014). Schelling dan Realisme Strategis. In R. Jackson, & G. Sorensen , *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* (pp. 132-133). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinkman, P. D. (2021, July 21). *Number of Private Contractors in Afghanistan Drops Precipitously as Biden Pushes Withdrawal Plan*. Retrieved from <https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2021-07-21/number-of-private-military-contractors-in-afghanistan-drops-precipitously-as-biden-pushes-withdrawal-plan>
- Swed, O., & Crosbie, T. (2019, March 15). *Who are the Private Contractors in Iraq and Afghanistan?* Retrieved from Military Times: <https://www.militarytimes.com/news/your-navy/2019/03/14/who-are-the-private-contractors-in-iraq-and-afghanistan/>
- Turzi, M. (2018). The Effects of Private Military and Security Companies on Local Populations in Afghanistan. *Journal of International Affairs*, 2-15.
- U.S Department of State. (2021, January 20). *U.S Relation With Afghanistan*. Retrieved from U.S Department of State: <https://www.state.gov/u-s-relations-with-afghanistan/>
- UNAMA. (2020, Februari 10). <https://unama.unmissions.org/mission-statement>. Retrieved from <https://unama.unmissions.org/>: <https://unama.unmissions.org/mission-statement>
- UNAMA. (2021). *Reports On The Protection of Civilians in Armed Conflict*. Retrieved from United Nations: <https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports>
- United Nations. (2019). *PMSCs & the UN*. Geneva: United Nations.
- Warsaw Institute. (2020, August 20). *The Awakening of Private Military Companies*. Retrieved from <https://warsawinstitute.org/awakening-private-military-companies/>
- Wolfers, A. (1962). *Discord And Collaboration Essays On International Politics*. Maryland: The Johns Hopkins Press.
- Zadorova, N. (2015). Private Military Companies: An Efficient Way of Meeting the Demand for Security? *Journal of International Relations*, 3-10.

